



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE  
DALAM PENYIDIKAN DI POLRESTABES SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun oleh:**

**Bagas Semesta**

**211003742018458**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM  
PENYIDIKAN DI POLRESTABES SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
BAGAS SEMESTA  
NPM : 211003742018458

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

ELEN ANEDYA FRAHMA, SH., MKN.  
NUPTK : 6448774675230193

Anggota,

ZABIDIN, SH.,MHUM  
NUPTK : 6745741642139002

Anggota,

DR. K A S T U B I , SH.,MHUM  
NUPTK : 7935742643130102

Mengetahui  
Dekan,



BRO. DEVDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Teori Hukum yang Relevan .....	19
C. Pengertian Tindak Pidana.....	22
D. Pengertian Penipuan.....	24
E. Pengertian Penipuan Online .....	26
F. Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.....	28
G. Pengertian Penyidikan .....	30
H. Pengertian Alat Bukti Elektronik .....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Jenis Penelitian Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	42

E. Metode Penyajian Data.....	44
F. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>48</b>
A. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Online dalam Tahap Penyidikan Menurut UU ITE di Polrestabes Semarang .....	48
B. Problematika yang dihadapi Penyidik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestabes Semarang .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia beriringan dengan maraknya tindak pidana penipuan online yang memanfaatkan media elektronik, sehingga aspek pembuktian khususnya terkait alat bukti elektronik menjadi isu sentral dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini membahas: (1) kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) penerapan pembuktian alat bukti elektronik dalam tahap penyidikan tindak pidana penipuan online, serta (3) problematika yang dihadapi penyidik dalam pembuktian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, penelitian ini didukung data lapangan berupa wawancara dengan penyidik Polrestaes Semarang sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti dalam pembuktian pidana berdasarkan Pasal 5 UU ITE, sepanjang memenuhi syarat dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyidikan, alat bukti elektronik umumnya dikombinasikan dengan alat bukti lain untuk memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah serta membangun keyakinan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Problematika utama pembuktian meliputi kesulitan pelacakan identitas pelaku akibat anonimitas dan penggunaan identitas palsu, volatilitas bukti digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi, keterbatasan kompetensi digital forensik dan sarana prasarana pendukung, serta ketergantungan pada akses data pihak ketiga yang tidak selalu cepat dan optimal.

**Kata kunci:** penipuan online, alat bukti elektronik, pembuktian, UU ITE, KUHAP, digital forensik.

## **ABSTRACT**

*The increasing use of the internet in Indonesia has been accompanied by a rise in online fraud crimes that exploit electronic media, making evidentiary issues, particularly electronic evidence a central concern in the criminal justice process. This research examines: (1) the legal standing and evidentiary strength of electronic evidence under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (the ITE Law) and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP); (2) the application of electronic evidence in the investigation stage of online fraud cases; and (3) the problems encountered by investigators in proving such offenses. This study employs a normative juridical legal research method through a literature review of statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal literature. To support the normative analysis, this research is supplemented by field data in the form of interviews with investigators at the Semarang Metropolitan Police (Polrestabes Semarang). The results indicate that electronic evidence constitutes lawful evidence as an extension of evidentiary instruments under Article 5 of the ITE Law, provided that it is accessible, displayable, its integrity is ensured, and it can be legally accounted for. In practice, electronic evidence is generally combined with other forms of evidence to satisfy the minimum requirement of two lawful pieces of evidence and to establish the judge's conviction as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. The main challenges in evidentiary practice include difficulties in tracing perpetrators due to anonymity and the use of false identities, the volatile nature of digital evidence that is easily deleted or manipulated, limited digital forensic expertise and supporting infrastructure, and dependence on third-party data access that is often slow and not optimal.*

*Keywords: online fraud, electronic evidence, proof, ITE Law, Criminal Procedure Code, digital forensics.*